

RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dedi Suhendri

Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Riau

Email: dedisuhendri51081@gmail.com

ABSTRAK

Ekosistem gambut berperan besar dalam menghadapi perubahan iklim. Indonesia memiliki area gambut yang sangat luas dan harus di jaga kelestariannya dan pemanfaatannya. Berbagai jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi dapat tumbuh dengan baik dengan tanah gambut, bahkan tanah gambut merupakan habitat alami beberapa tanaman tersebut. Adapun kendala yang terjadi dari partisipasi dalam pelestarian ekosistem gambut khususnya di Provinsi Riau: 1. Pemulihan Kebakaran lahan gambut dan budidaya yang kurang tepat 2. Teknik budidaya yang kurang tepat. 3. Pembakaran Liar. Restorasi ekosistem tanah gambut berbasis masyarakat perlu dilakukan di setiap daerah dan dikelola oleh instansi terkait. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui telaah dokumendari berbagai sumber dari kegiatan ini. Observasi dilaksanakan melihat langsung dilapangan permasalahan yang terjadi dan wawancara penulis menyiapkan rangkuman pertanyaan yang akan ditanyakan pada pihak terkait seperti masyarakat setempat dan instansi terkait. Dari penelitian dilapangan dari indikator yang berpedoman terbukti dari kebakaran hutan dan peneglolaan yang kurang baik dari masyarakat terbukti dalam 2 tahun terakhir ini ekosistem tanah gambut dengan pemberdayaan masyarakat cukup baik dilaksanakan terbukti dari Desa yang terkena dampak buruk tanah gambut dengan cepatnya pemulihan dan tanah gambut bisa dikelola oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian dan kestabilan lingkungan.

Kata kunci : Restorasi, implementasi, tanah gambut, pemberdayaan, masyarakat

PENDAHULUAN

Ekosistem gambut berperan besar dalam menghadapi perubahan iklim. Indonesia memiliki area gambut yang sangat luas dan harus dijaga kelestariannya dan pemanfaatannya. Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang tergenang air sehingga materi-materi tanaman tidak bias membusuk sepenuhnya. Hutan gambut memiliki daya serap yang sangat tinggi, bahkan mampu menampung air hingga sebanyak 450 sampai 850 persen bobot keringnya atau kurang lebih 90% dari volumenya. Karena kemampuan gambut itu, gambut bermanfaat besar dalam mengurangi dampak buruk banjir maupun kemarau, lahan ini mampu menahan air dalam jumlah besar sehingga mencegah banjir saat musim hujan, dan melepaskannya pada musim kemarau,

Berbagai jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi dapat tumbuh dengan baik dengan tanah gambut, bahkan tanah gambut merupakan habitat alami beberapa tanaman tersebut. Beberapa diantaranya termasuk rotan, karet, nanas, rumbia, tebu, sagu, dan lain-lain. Bahkan untuk dijadikan budidaya ternak ikan tanah gambut merupakan ekosistem yang bagus untuk budidaya ikan, berbagai ikan diantaranya yaitu ikan lele, nila, dan ikan patin.

Dari beberapa aspek inilah tanah gambut mempunyai kaya manfaat bagi kehidupan bahkan bisa menunjang perekonomian masyarakat yang memanfaatkan tanah gambut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pelestarian tanah gambut khususnya di Kecamatan Bengkalis di Desa Jangkang turut memprihantinkan terjadi kerusakan tanah gambut yang cukup besar sehingga terjadilah abrasi dan kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait terhadap hutan gambut yang ada di Provinsi Riau.

Dalam hal ini perlunya restorasi tanah gambut yang berdampak pada perbaikan ekosistem tanah gambut. Restorasi merupakan bagian dari implementasi dari perkembangan ekosistem tanah gambut. Menurut Grindle Implementasi adalah

menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah. Menurut Lane dan Nugroho (2015) konsep implementasi mencakup dua hal yaitu program kebijakan (*policy*) yang kemudian akan menghasilkan *outcomes*. Berdasarkan definisi implementasi tersebut maka terdapat 2 konsep dalam implementasi yaitu : 1. Implementasi sebagai pencapaian kebijakan (*policy achievement*) fokus dalam konsep ini adalah evaluasi, yaitu menilai (Implementation judgment) sampai sejauh mana keberhasilan implementasi (*fungsi penyelesaian/ accomplishment function*). 2. Implementasi sebagai proses atau eksekusi kebijakan yang memberikan fokus kepada prosesnya. Dalam suatu proses implementasi menurut Dunsire (Wahab, 2002) terdapat apa yang dinamakan *implementation gap*, yaitu : " suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan dengan apa yang kenyataannya dicapai .

Pentingnya restorasi tanah gambut dalam hal ini berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat ikut serta dalam melestarikan tanah gambut di perdayakan oleh pemerintah setempat untuk pelestarian ekosistem tanah gambut sehingga dengan terjadinya pemeliharaan ini tanah gambut yang semulanya rusak menjadi baik manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat dan juga berdampak pada kenaikan ekonomi masyarakat juga dikarenakan sebagian masyarakat di perdesaan ada mata pencaharian utamanya adalah karet dengan ini bisa dimanfaatkan tanah gambut sebagai untuk kesuburan pohon karet. Adapun kendala yang terjadi dari partisipasi dalam pelestarian ekosistem gambut :

1. Pemulihan Kebakaran lahan gambut dan budidaya yang kurang tepat Disebabkan karena keterbatasan lahan, sebagian petani di lahan gambut menggunakan lahan untuk budidaya dengan komoditas yang kurang sesuai dengan tipologinya sebagai contoh penggunaan lahan gambut yang sangat tebal untuk budidaya semusim.
2. Teknik budidaya yang kurang tepat
Teknik budidaya seperti pembukaan lahan, tanah air, penataan lahan, dan pemilihan komoditas yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan gambut.
3. Pembakaran liar ilegal logging merupakan pengambilan kayu hutan secara tidak sah yang menyebabkan kerugian negara, dan cenderung mengabaikan ketentuan pelestarian hutan dan lingkungan. Kawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga malah dibakar secara liar. Restorasi ekosistem tanah gambut berbasis masyarakat perlu dilakukan di setiap daerah dan dikelola oleh instansi terkait perlu dilaksanakan instansi terkait sebagai pengelola selanjutnya melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan diberdayakan mempunyai pengaruh penting demi kelangsungan tanah gambut yang akan dirasakan bagi masyarakat setempat.

METODE

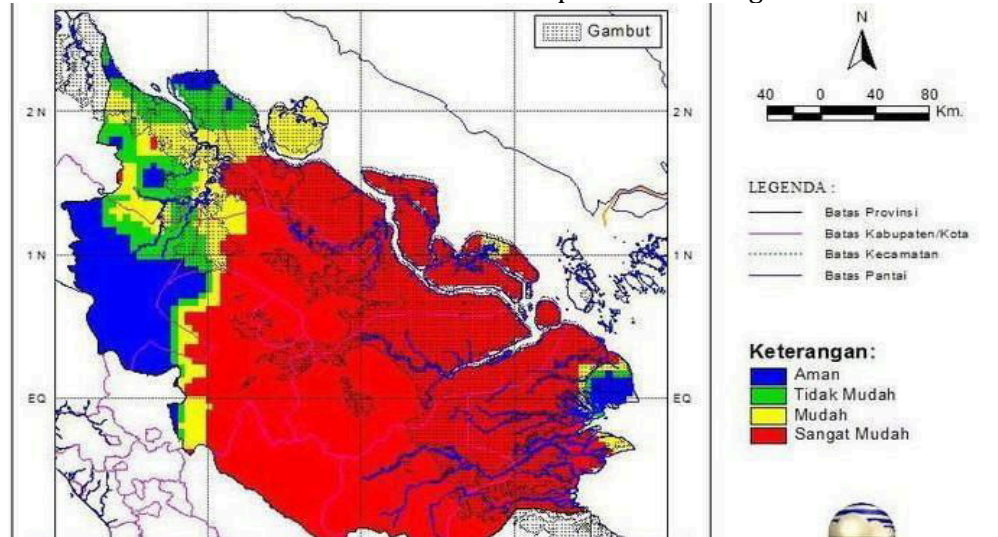
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui telaah dokumen dari berbagai sumber dari kegiatan ini. Observasi dilaksanakan melihat langsung di lapangan permasalahan yang terjadi dan wawancara penulis menyiapkan rangkuman pertanyaan yang akan ditanyakan pada pihak terkait seperti masyarakat setempat dan instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini berpedoman kepada badan restorasi gambut nasional merupakan lembaga nonstructural yang bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tujuan adalah mewujudkan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi tanah gambut akibat kebakaran hutan dan lahan dari kegiatan ini dilakukan secara

husus yaitu sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan bagi kerusakan hutan gambut di Provinsi Riau, bencana yang selalu terjadi di musim kemarau ini membuat lahan gambut terbakar akibat kurangnya pemasukan air di hutan gambut ada juga terdapat dari ulah manusia sendiri dibakar sengaja ingin membuka lahan perkebunan hal ini tentunya merusak perkembangan ekologis hutan gambut. Provinsi Riau mempunyai besaran hutan gambut mencapai 3.859.552 ha, Provinsi Riau sebagai salah satu Provinsi dengan bencana karlahut terbesar di Indonesia dapat dilihat dari gambar berikut :



Sumber : hasil overlay titik api tahun 2019

Gambar diatas adalah sebaran titik kebakaran di riau diambil pada tahun 2019 dan seiring berjalan nya waktu kebakaran terus terjadi apabila musim kemarau tentuhal ini membuat kerusakan tanah gambut yang ada di provinsi riau semakin parah. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu perlunya pemulihan ekosistem tanah gambut bersama masyarakat agar pemulihan secepatnya berjalan dengan baik. Konsep pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 4 (Sri najiyati 2005) :

1. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki- laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses salingbelajar.

2, Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalahprogram yang sifatnya parstisipatif, direncanakan, awasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan semacam itu, perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat seolah-olah dilakukan secara efisien, namun sesungguhnya kemandirian masyarakat tidak dapat tumbuh secara sehat.

Itulah sebabnya sering ditemukan proyek-proyek yang dibiayai pemerintah kurang terpelihara dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, proyek- proyek swadaya murni yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan oleh masyarakat jarangterbengkalai.

3. Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (the have little) [Verhagen, 1996]. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola hutan yang kurang baik serta pembakaran secara liar merupakan penyebab utama dari kerusakan tanah gambut di provinsi Riau yang menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan menurunnya keanekaragaman hayati dan merosotnya ekonomi warga setempat. Menurut (Ginjar Kartasmita 1995), implementasi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga upaya. Pertama dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga dengan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.

Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus di pegang oleh instansi terkait pengelolaan pemeliharaan ekosistem tanah gambut. Perhatian khusus dari pemerintah Provinsi bertanggung jawab akan pelestarian ekosistem gambut khususnya di Riau Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi Riau menyalurkan bantuan 1,8 miliar kepada 11 kelompok masyarakat pada bulan Juli lalu, hal ini agar mereka bisa menjaga infrastruktur pembahasan gambut sekaligus melindungi lahan gambut di desa masing-masing, bantuan ini disalurkan melalui program revitalisasi akibat kebakaran lahan di Rohil pada tahun kemaren dan untuk meningkatkan sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Pelalawan, Indra Giri Hilir, dan Kota Dumai. Dan dana ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tugas pembantuan anggaran tahun 2022 pada Satker Dinas lingkungan hidup Provinsi Riau ucap Staff Dinas Lingkungan hidup Provinsi Riau Pak Isnaini. Beliau mengatakan “ *revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat sebagai upaya penguatan ekonomi dan dilaksanakan oleh BRG sebagai salah satu merestorasi lahan gambut dan hal ini dilaksanakan bergiliran di setiap Kabupaten yang berdampak pada kerusakan gambut akibat kebakaran hutan*”

Partisipatif

Partisipatif dalam praktek meaksudnya adalah pihak pemerintah dan instansi terkait selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi terhadap masyarakat yang akan di perdayakan untuk pemeliharaan ekosistem gambut, Pemeliharaan ekosistem gambut perlunya koordinasi

dan bimbingan dari instansi terkait dan perlu adanya sosialisasi yang akan mempermudah masyarakat mengelola dan menjaga tanah gambut seperti halnya di Kabupaten Bengkalis di Desa Kuala alam terjadi kerusakan tanah gambut berkisar 4 hektar pada tahun 2017 dikarenakan masyarakat dan instansi terkait cepat akan pemulihannya dan sekarang sukses lahan gambut yang terbakar pada tahun 2017 sukses mengubah lahan gambut menjadi kebun nenas dan berhasil menjadi pememng 10 Desa Brilian dan tidak lepas dari tangan dingin Romadhony Syafar, dari hasil wawancara beliau mengatakan “ *akan mengajukan desa kuala alam ikut mengikuti kompetisi desa Brilian karena melihat prospek masyarakat yang mau maju dan tidak sedikit dari mereka yang menhelola hasil tani namun juga berkembang demi mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik*”.

Keswadayaan

Keswadayaan adalah merupakan pengembangan masyarakat yang memanifestasikan strategi dan prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan oleh pihak lain. Wawancara bersama Pak Rahmat masyarakat Desa Buatan sari Kabupaten Siak yang sukses mengolah lahan gambut tanpa pembakaran hutan. Beliau mengatakan “ *jika sebelumnya warga membakar hutan dan lahan untuk bertani namun setelah adanya pelatihan dari sekolah lapangan petani gambut (SLPG) bahan binaan diterapkan dilapangan dan sukses bertani tanpa membakar lahan dan memanfaatkan lahan kosong untuk bertani*”

Berkelanjutan

Banyak kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang sudah tiada dan tidak berkelanjutan. Dalam konsep berkelanjutan ini diharapkan setiap program pemberdayaan yang sudah berjalan dan akan selesai terus berjalan dgn efektif dan hal ini akan berdampak baik pada program pemeliharaan ekosistem gambut.

Seerti halnya di Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis program pelatihan Lapangan petani gambut (SLPG) sudah tidak berjalan lagi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan koordinasi pemerintah dan instansi terkait, berikut wawancara bersama Indra warga Desa Jangkang sekaligus pernah mengikuti pelatihan (SLPG), beliau mengatakan “ *Sekolah lapangan petani gambut (SLPG) awal-awal sering dilaksanakan dan difasilitasi tempat dan belajarnya, akan tetapi seiring berjalannya waktu sesudah penerapan dilapangan pelatihan ini sudah tidak berjalan*” menurut indra pendanaan dan koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah belum maksimal dengan baik.

Dari penelitian dilapangan wawancara serta observasi penulis lakukan di lapangan dari indikator yang berpedoman pada metode penelitian, terbukti dari kebakaran hutan dan pengelolaan yang kurang baik inilah yang menjadi utama kendala bagi pelestarian ekosistem gambut di Provinsi Riau. Kalau dilihat dari tingkat efektifitas masyarakat terbukti cukup baik dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir ini ekosistem tanah gambut dengan pemberdayaan masyarakat cukup baik dilaksanakan terbukti dari Desa yang terkena dampak buruk pembakaran liar, dengan cepatnya pemulihan dan tanah gambut bisa dikelola oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian dan kestabilan lingkungan.

KESIMPULAN

Dalam restorasi ekosistem gambut dengan memperdayakan masyarakat perlu memperahtikan suatu kajian dan bimbingan dari pemerintah setempat agar berjalan dengan baik hal ini mencakup sosialisasi, pendanaan, pelatihan, dikarenakan masyarakat merupakan subjek dari pembangunan ekosistem lingkungan hidup salah satunya adalah lahan gambut. masyarakat menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan. Namun, karena kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian dan perencanaan masih serba sedikit, mereka harus dibantu, didorong, didampingi, dan ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu menganalisis dan

mengenali kebutuhan-kebutuhannya. Dalam banyak kasus, patut diakui bahwa masyarakat acapkali belum dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dengan demikian, proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rencana dapat berjalan lancar dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn William N., 2003, Analisis Kebijakan Publik, Hanindita, Yogyakarta
- GINANJAR Kartasmita.1995. Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang,
- Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Restorasi Gambut.
- Rian Nugroho ,2015 , kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta
- Sri Najiati dan Agus Asmana 2005, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, Bogor